

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN APRIL 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan April 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan April 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan April 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- a. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1140-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;
- b. Surat Keputusan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1130-1-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (Enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;

- c. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1144-PW.0101 Tahun 2019 tentang Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-1911-PW.04.01 tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - e. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-GR.03.01-1680-1 tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - f. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-1450-1-PW.01.01 tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - g. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-2254-GR.04.01 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyebaran Informasi KIM dan Kampanye WBK pada acara CFD Surabaya;
 - h. Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-2064-GR.01.02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyebaran Informasi KIM pada Talk Show Radio Sonora dan SMART FM;
 - i. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1800 Tanggal 10 April 2019 Hal Sosialisasi Pelatihan Budaya Kerja PASTI.
2. Penataan Tata Laksana
- a. Pemutakhiran informasi layanan publik di website;
 - b. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
 - c. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG;
 - d. Pemutakhiran Aplikasi E-PERFORMANCE;
 - e. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - f. Pemutakhiran Aplikasi APAPO;
 - g. Pemutakhiran Aplikasi SIMKIM.
3. Penataan Manajemen SDM
- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1001-1.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tanggal 15 Februari 2019;
 - b. Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W.15-UM.01.01-103 Tanggal 08 Februari 2019 Hal Menghadap Untuk Melaksanakan Tugas;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Nomor W.15.IMI.IMI.1-915.KP.03.03 Tahun 2019 Tanggal 12 Februari 2019 a.n. Aditya Prastha Noerliawan;
 - d. Rapat Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK dan peta jabatan;
 - e. Rapat evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit Nota Dinas Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1197-1 Tanggal 27 Februari 2019 Hal Rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan CPNS;
 - f. Laporan Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2221 Tanggal 15 April 2019 Hal Laporan Pelaksanaan Apel Pagi Internalisasi Kode Etik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas;
 - g. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1.2065-KP.05.02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pegawai

Teladan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tanggal 05 April 2019.

4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - b. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W15.IMI.IMI.01-UM.01.01-776-1 Tanggal 06 Februari 2019 Hal Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W15.IMI.IMI.01-UM.01.01-1637-1 Tanggal 18 Maret 2019 Hal Rapat Renja Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK;
 - d. Surat keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-PR.01.02-1708-1 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Program Anti Korupsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1141-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Pungutan Liar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1143-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
 - c. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1258-1 Tanggal 01 Maret 2019 Hal Pemberitahuan Mekanisme Pelaporan WBS;
 - d. Laporan Apel: Surat Kepala Bagian Tata Usaha Nomor W.15.IMI.IMI.1-KP.05.01-1318 Tanggal 04 Maret 2019 Hal laporan Absensi apel Sosialisasi Aplikasi WBS Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - e. Surat Kepala Kantor Nomor. W.15.IMI.IMI.1- PW.03.01-2009 Tanggal 04 April 2019 Hal Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2019 (Mitigasi Resiko);
 - f. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2436-1 Tanggal 29 April 2019 Hal Apel Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Pembentukan Tim Inovasi pada masing-masing Bidang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - b. Inovasi mulai diterapkan pada pelayanan keimigrasian yang dilakukan oleh masing-masing bidang.

Kegiatan kerja yang perlu dilengkapi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan April 2019 meliputi:

1. Pemenuhan data dukung untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar segera memenuhi data dukung yang diperlukan untuk pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan April 2019 untuk digunakan sebagai

bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 02 Mei 2019
Kepala Tim Manajemen Perubahan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Habiburrahman', with a stylized, flowing script.

HABIBURRAHMAN
NIP. 19710730 199603 1 001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN MARET 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan Maret 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Maret 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- a. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1140-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;
- b. Surat Keputusan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1130-1-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (Enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;

- c. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1144-PW.0101 Tahun 2019 tentang Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-1911-PW.04.01 tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - e. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-GR.03.01-1680-1 tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - f. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-1450-1-PW.01.01 tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. Pemutakhiran informasi layanan publik di website;
 - b. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
 - c. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG;
 - d. Pemutakhiran Aplikasi E-PERFORMANCE;
 - e. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA.
 3. Penataan Manajemen SDM
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1001-1.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tanggal 15 Februari 2019;
 - b. Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur Nomor W.15-UM.01.01-103 Tanggal 08 Februari 2019 Hal Menghadap Untuk Melaksanakan Tugas;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Nomor W.15.IMI.IMI.1-915.KP.03.03 Tahun 2019 Tanggal 12 Februari 2019 a.n. Aditya Prastha Noerliawan;
 - d. Rapat Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK dan peta jabatan;
 - e. Rapat evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit Nota Dinas Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1197-1 Tanggal 27 Februari 2019 Hal Rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan CPNS.
 4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - b. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.01-UM.01.01-776-1 Tanggal 06 Februari 2019 Hal Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.01-UM.01.01-1637-1 Tanggal 18 Maret 2019 Hal Rapat Renja Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK;
 - d. Surat keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-PR.01.02-1708-1 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Program Anti Korupsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1141-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian

Pungutan Liar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1143-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
 - c. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1258-1 Tanggal 01 Maret 2019 Hal Pemberitahuan Mekanisme Pelaporan WBS;
 - d. Laporan Apel: Surat Kepala Bagian Tata Usaha Nomor W.15.IMI.IMI.1-KP.05.01-1318 Tanggal 04 Maret 2019 Hal laporan Absensi apel Sosialisasi Aplikasi WBS Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Pembentukan Tim Inovasi pada masing-masing Bidang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Kegiatan kerja yang belum dilaksanakan dan masuk ke dalam rencana kinerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Maret 2019 meliputi:

1. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Tim Inovasi yang telah dibentuk pada tiap Bidang diharapkan segera memenuhi dokumen pendukung dan segera melaksanakan inovasi untuk pemenuhan Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar kegiatan kerja yang belum terlaksana dapat segera dilaksanakan pada bulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan April 2019 untuk digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 01 April 2019

Kepala Tim Manajemen Perubahan,



HABIBURRAHMAN

NIP. 19710730 199603 1 001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN FEBRUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan Februari 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

- 1. Umum
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Dasar
- 4. Ruang Lingkup
- 5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Februari 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- a. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1140-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;
- b. Surat Keputusan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1130-1-PW.01.01 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (Enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019;

- c. Surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1144-PW.0101 Tahun 2019 tentang Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tanggal 22 Februari 2019.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. Pemutakhiran informasi layanan publik di website;
 - b. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
 - c. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG.
3. Penataan Manajemen SDM
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1001-1.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tanggal 15 Februari 2019;
 - b. Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W.15-UM.01.01-103 Tanggal 08 Februari 2019 Hal Menghadap Untuk Melaksanakan Tugas;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Nomor W.15.IMI.IMI.1-915.KP.03.03 Tahun 2019 Tanggal 12 Februari 2019 a.n. Aditya Prastha Noerliawan.
4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - b. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.01-UM.01.01-776-1 Tanggal 06 Februari 2019 Hal Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1141-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Pungutan Liar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-1143-PW.0101 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019.

Kegiatan kerja yang belum dilaksanakan dan masuk ke dalam rencana kinerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Februari 2019 meliputi:

1. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan CPNS;
3. Rapat Renja Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK;
4. Pembentukan Tim Inovasi pada tiap Bidang untuk pemenuhan Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar kegiatan kerja yang belum terlaksana dapat segera dilaksanakan pada bulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan Februari 2019 untuk digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 01 Maret 2019
Kepala Tim Manajemen Perubahan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Habiburrahman', with a stylized, cursive script.

HABIBURRAHMAN
NIP. 19710730 199603 1 001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN JANUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan Februari 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Januari 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-030-1-PW.01.01 tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

2. Penataan Tata Laksana

- a. Pemutakhiran informasi layanan publik di website;
- b. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
- c. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG;
- d. Pemutakhiran Aplikasi E-PERFORMANCE;

- e. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - f. Pemutakhiran Aplikasi APAPO;
 - g. Pemutakhiran Aplikasi SIMKIM;
 - h. Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Penataan Manajemen SDM
 - a. Surat Kepala Kantor Nomor W1.5.IMI.IMI1-KP.04.04-412 tanggal 24 Januari 2019 Hal Pengusulan Analis Kebutuhan Diklat Tahun 2019;
 - b. Surat Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM1.01-1514 Tanggal 13 Maret 2019 Hal usulan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat eselon III dan IV pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - c. Persetujuan SKP;
 - d. Penetapan Kinerja dalam aplikasi E-PERFORMANCE;
 - e. Perjanjian Kinerja;
 - f. Pengukuran Kinerja Bulanan Pejabat Struktural.
 4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. RKA-KL;
 - b. Rencana Kerja/DIPA Satker;
 - c. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - d. Perjanjian Kinerja.
 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat periode bulan Januari 2019;
 - b. Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat pada bulan Januari 2019.

Kegiatan kerja yang belum dilaksanakan dan masuk ke dalam rencana kinerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Januari 2019 meliputi:

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
2. Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (Enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
3. Rencana Kerja Pembangunan ZI dan Target Prioritas Menuju WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;
4. Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
5. Pembentukan Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
6. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
7. Surat Perintah Menghadap Untuk Melaksanakan Tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
8. Evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit bulan Februari 2019;
9. Usulan Mutasi ASN;
10. Pengembangan Pegawai;
11. Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Bulanan;
12. Pembentukan Unit Pengendalian Pungutan Liar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;
13. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;
14. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;

15. Pembentukan Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;
16. Laporan Pengaduan Masyarakat (Monev Pengaduan per bulan).

IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar kegiatan kerja yang belum terlaksana dapat segera dilaksanakan pada bulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan Februari 2019 untuk digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 04 Februari 2019
Kepala Tim Manajemen Perubahan,



HABIBURRAHMAN
NIP. 19710730 199603 1 001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN JUNI 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan Juni 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Juni 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Penataan Tata Laksana

- a. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
- b. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG;
- c. Pemutakhiran Aplikasi E-PERFORMANCE;
- d. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
- e. Pemutakhiran Aplikasi APAPO;
- f. Pemutakhiran Aplikasi SIMKIM;
- g. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi;
- h. Pemutakhiran informasi layanan public di website.

2. Penataan Manajemen SDM

- a. Pengukuran Kinerja Bulanan Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

3. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA.

4. Penguatan Pengawasan

- a. Laporan Hasil Kegiatan Pengamanan Internal Harian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;

- b. Laporan Bulanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas Duta Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - b. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas Piket Jam Istirahat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Kegiatan kerja yang perlu dilengkapi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Juni 2019 meliputi:

1. Pemenuhan data dukung untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar segera memenuhi data dukung yang diperlukan untuk pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan Mei 2019 untuk digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 01 Juli 2019
Kepala Tim Manajemen Perubahan,



HABIBURRAHMAN
NIP. 19710730 199603 1 001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
PERIODE BULAN MEI 2019**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang perkembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan gambaran bahwa apa yang sudah dievaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setiap bulannya.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM periode bulan Mei 2019 dilaksanakan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. TINDAK LANJUT

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 dengan sasaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya guna menghindari adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya.

III. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Mei 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- a. Nota Dinas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2575 Tanggal 03 Mei 2019 tentang In House Training "Pelatihan Budaya Kerja".

2. Penataan Tata Laksana

- a. Pemutakhiran liputan kegiatan di website;
- b. Pemutakhiran Aplikasi SIMPEG;
- c. Pemutakhiran Aplikasi E-PERFORMANCE;
- d. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
- e. Pemutakhiran Aplikasi APAPO;
- f. Pemutakhiran Aplikasi SIMKIM;
- g. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi;
- h. Pemutakhiran informasi layanan public di website.

3. Penataan Manajemen SDM

- a. Nota Dinas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2575 Tanggal 03 Mei 2019 tentang In House Training "Pelatihan Budaya Kerja";
- b. Pengukuran Kinerja Bulanan Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pemutakhiran Aplikasi MONEV DJA;
 - b. Surat Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.01-UM.01.01-2641 Tanggal 09 Mei 2019 Hal Usulan Peserta Diklat Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Nomor W15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2660-1 Tanggal 10 Mei 2019 Hal Laporan Hasil Penanganan Benturan kepentingan;
 - b. Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha Nomor W15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2659-1 Tanggal 10 Mei 2019 Hal Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan (laporan nihil).
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Laporan Kegiatan In House Training "Pelatihan Budaya Kerja" berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Nomor W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-2575 Tanggal 03 Mei 2019;
 - b. Inventarisasi inovasi pelayanan Keimigrasian, antara lain seperti:
 - 1) Aplikasi SADIS;
 - 2) Aplikasi KITAS Online;
 - 3) Aplikasi Barang Persediaan;
 - 4) Information Center;
 - 5) Aplikasi Pengambilan Paspor;
 - 6) Kerjasama dengan Pemkab Sidoarjo yakni Mal Pelayanan Publik;
 - 7) Kerjasama dengan Pemkot Mojokerto yakni Mojokerto Service Center;
 - 8) Kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Paspor Tenaga Kerja.

Kegiatan kerja yang perlu dilengkapi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selama bulan Mei 2019 meliputi:

1. Pemenuhan data dukung untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

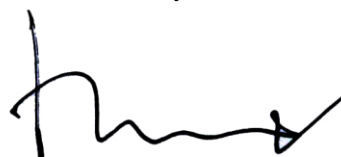
IV. TINDAK LANJUT

1. Kegiatan kerja yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen *output*;
2. Agar segera memenuhi data dukung yang diperlukan untuk pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya periode bulan Mei 2019 untuk digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 10 Juni 2019
Kepala Tim Manajemen Perubahan,



HABIBURRAHMAN
NIP. 19710730 199603 1 001